

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir semakin menempatkan kartel narkoba dan kejahatan terorganisir transnasional sebagai ancaman keamanan yang tidak hanya berdampak pada level domestik, tetapi juga pada stabilitas kawasan Amerika. Ancaman tersebut berkaitan dengan kemampuan jaringan kriminal lintas negara dalam mengoperasikan perdagangan narkoba, penyelundupan senjata, pencucian uang, serta aktivitas kekerasan yang melampaui batas negara. Dalam konteks ini, kartel narkoba tidak lagi dipahami hanya sebagai pelaku kejahatan domestik atau perbatasan, tetapi sebagai aktor non-negara yang mampu menciptakan persoalan keamanan regional. Oleh karena itu, respons Amerika Serikat terhadap kartel narkoba mengalami perluasan dari pendekatan domestik dan bilateral menuju pendekatan keamanan regional.

Perluasan respons tersebut tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya perhatian Amerika Serikat terhadap dampak kartel narkoba terhadap keamanan nasional. Kartel tidak hanya dipandang sebagai aktor kriminal yang terlibat dalam perdagangan narkoba, tetapi juga sebagai jaringan transnasional yang memiliki kapasitas organisasi, sumber daya ekonomi, dan jaringan lintas batas yang luas. Dalam konteks Amerika Serikat, persoalan ini semakin menonjol karena aktivitas kartel berkaitan dengan peredaran fentanil ilegal, kekerasan lintas batas, serta ancaman terhadap keamanan perbatasan. Namun, dalam penelitian ini, fentanil

dan penyelundupan narkotika tidak ditempatkan sebagai fokus utama, melainkan sebagai konteks yang menunjukkan mengapa kartel narkotika menjadi isu penting dalam strategi keamanan Amerika Serikat.

Krisis opioid tetap menjadi latar penting dalam memahami mengapa Amerika Serikat meningkatkan perhatian terhadap kartel narkotika. Sejak akhir 1990-an, krisis opioid berkembang dari persoalan penyalahgunaan opioid resep menjadi krisis yang semakin berkaitan dengan pasar narkotika ilegal. Perubahan tersebut semakin terlihat sejak meningkatnya peredaran fentanil ilegal yang memiliki potensi mematikan lebih tinggi dibandingkan opioid lainnya. Dalam konteks ini, persoalan opioid tidak lagi hanya dipahami sebagai isu kesehatan publik, tetapi juga berkaitan dengan jaringan kriminal transnasional yang memproduksi, mengedarkan, dan menyelundupkan narkotika ke wilayah Amerika Serikat (Kolodny et al., 2015; Centers for Disease Control and Prevention, 2023).

Meskipun demikian, penelitian ini tidak berfokus pada mekanisme penyelundupan opioid atau jalur peredaran fentanil secara teknis. Pembahasan mengenai opioid dan fentanil digunakan untuk menunjukkan bahwa ancaman kartel narkotika telah mendorong Amerika Serikat membangun pendekatan keamanan yang lebih luas. Dengan kata lain, isu opioid dalam penelitian ini berfungsi sebagai konteks empiris yang menjelaskan mengapa kartel narkotika diposisikan sebagai ancaman keamanan regional. Fokus utama penelitian tetap diarahkan pada bagaimana Amerika Serikat membentuk kerja sama keamanan regional melalui strategi *coalition-building* dalam *Americas Counter Cartel Coalition*.

Perubahan orientasi tersebut terlihat melalui penyelenggaraan *Americas Counter Cartel Conference* pada 5 Maret 2026 di markas U.S. Southern Command, Doral, Florida. Forum ini mempertemukan pejabat pertahanan dan keamanan dari negara-negara kawasan untuk membahas tujuan keamanan bersama dalam menghadapi kartel narkoba, *narco-terrorism*, *trafficking*, dan ancaman lintas batas lainnya. Dalam forum tersebut, Amerika Serikat bersama negara-negara peserta menandatangani deklarasi keamanan bersama yang menekankan komitmen terhadap perdamaian, kedaulatan, stabilitas kawasan, serta peningkatan kerja sama keamanan regional. Deklarasi tersebut juga menegaskan pentingnya perluasan kerja sama bilateral dan multilateral dalam menghadapi jaringan *narco-terrorist* dan ancaman bersama di kawasan Western Hemisphere (Olay, 2026; U.S. Southern Command Public Affairs, 2026).

Penyelenggaraan *Americas Counter Cartel Conference* menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak hanya merespons ancaman kartel melalui kebijakan domestik atau kerja sama bilateral, tetapi juga melalui pembentukan kerangka kerja sama regional. Dalam hal ini, forum tersebut menjadi ruang diplomatik bagi Amerika Serikat untuk membangun dukungan kawasan terhadap agenda keamanan anti-kartel. Melalui konferensi dan deklarasi keamanan bersama, Amerika Serikat berupaya membentuk persepsi bahwa kartel narkoba dan kejahatan transnasional merupakan ancaman bersama yang membutuhkan respons kolektif. Dengan demikian, *Americas Counter Cartel Conference* dapat dipahami sebagai bagian dari proses awal pembentukan koalisi keamanan regional yang dipimpin oleh Amerika Serikat.

Pembentukan *Americas Counter Cartel Coalition* menjadi penting untuk dikaji karena menunjukkan bagaimana Amerika Serikat menggunakan strategi *coalition-building* dalam merespons ancaman keamanan regional. *Coalition-building* dalam konteks ini tidak hanya dipahami sebagai pembentukan kerja sama teknis antarnegara, tetapi juga sebagai proses politik dan diplomatik untuk membangun dukungan, memilih mitra, serta menentukan bentuk kerja sama yang sesuai dengan kepentingan negara pemimpin. Henke (2019) menjelaskan bahwa koalisi yang dipimpin oleh Amerika Serikat tidak terbentuk secara otomatis hanya karena adanya ancaman bersama. Sebaliknya, koalisi dibentuk melalui proses diplomatik yang melibatkan pembacaan kepentingan calon mitra, penyesuaian preferensi, dan konstruksi dukungan politik terhadap agenda yang ditawarkan oleh negara pemimpin (Henke, 2017; Henke, 2019).

Dalam konteks tersebut, ACCC dapat dilihat sebagai instrumen strategi keamanan regional Amerika Serikat. Melalui koalisi ini, Amerika Serikat berupaya memperluas dukungan terhadap agenda keamanan anti-kartel, memperkuat koordinasi dengan negara-negara kawasan, dan membentuk kerangka kerja sama yang selaras dengan kepentingan keamanannya. Koalisi ini tidak hanya menunjukkan adanya respons terhadap ancaman kartel narkoba, tetapi juga memperlihatkan bagaimana Amerika Serikat mengorganisasi dukungan regional melalui mekanisme diplomatik. Oleh karena itu, pembentukan ACCC perlu dianalisis bukan semata-mata sebagai respons terhadap penyelundupan narkoba, tetapi sebagai bagian dari strategi *coalition-building* Amerika Serikat dalam membentuk arsitektur keamanan regional.

Pentingnya koalisi dalam strategi keamanan Amerika Serikat juga dapat dipahami melalui pandangan Kreps. Kreps menjelaskan bahwa Amerika Serikat, meskipun memiliki kapasitas untuk bertindak secara unilateral, tetap memiliki insentif untuk membentuk koalisi karena koalisi dapat memberikan legitimasi politik, memperluas dukungan internasional, dan membantu pembagian beban dalam pelaksanaan agenda keamanan (Kreps, 2011). Dengan demikian, koalisi dapat berfungsi sebagai instrumen politik sekaligus strategis bagi Amerika Serikat. Dalam kasus *Americas Counter Cartel Coalition*, pembentukan koalisi memungkinkan Amerika Serikat untuk menampilkan respons anti-kartel sebagai agenda regional, bukan hanya sebagai kebijakan sepihak Amerika Serikat.

Namun, pembentukan koalisi keamanan regional tersebut juga memperlihatkan adanya dinamika selektivitas. Koalisi tidak selalu melibatkan seluruh negara yang memiliki keterkaitan dengan sumber ancaman. Sebaliknya, negara pemimpin koalisi dapat menentukan negara mana yang dianggap sesuai untuk dilibatkan berdasarkan kepentingan, preferensi keamanan, hubungan politik, serta kesediaan mendukung agenda kerja sama. Dalam konteks ACCC, dinamika ini terlihat dari komposisi awal koalisi yang tidak sepenuhnya melibatkan beberapa negara penting di kawasan Amerika Latin. Ketidakterlibatan negara-negara tersebut menjadi penting karena menunjukkan bahwa pembentukan koalisi tidak hanya ditentukan oleh relevansi ancaman, tetapi juga oleh kalkulasi politik dan strategis Amerika Serikat sebagai negara pemimpin.

Salah satu dinamika yang menonjol adalah tidak terlibatnya Meksiko, Brasil, dan Kolombia dalam komposisi awal kerja sama tersebut. Dalam artikel

analisis Chatham House, Sabatini menilai bahwa absennya Meksiko, Brasil, dan Kolombia menjadi kelemahan dalam pembentukan koalisi karena ketiganya merupakan negara penting dalam isu keamanan dan narkoba di kawasan Amerika Latin (Sabatini, 2026). Znojek juga menjelaskan bahwa pertemuan Shield of the Americas di Doral tidak melibatkan Brasil, Kolombia, dan Meksiko, meskipun ketiganya merupakan negara penting dalam penanganan kejahatan regional (Znojek, 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa negara yang relevan terhadap suatu isu belum tentu otomatis dilibatkan dalam desain koalisi yang dibentuk oleh Amerika Serikat.

Meksiko menjadi contoh penting dalam dinamika tersebut karena negara ini memiliki keterkaitan langsung dengan isu kartel narkoba, fentanil, dan keamanan perbatasan Amerika Serikat. Namun, penelitian ini tidak menempatkan Meksiko sebagai pusat utama penelitian, melainkan sebagai salah satu contoh yang memperlihatkan adanya batas dalam proses *partner selection* dan *selective cooperation*. Posisi Meksiko penting karena menunjukkan bahwa relevansi terhadap ancaman tidak selalu sejalan dengan kesesuaian politik dan preferensi keamanan dalam suatu koalisi. Dengan demikian, ketidakterlibatan Meksiko bukan dibahas sebagai persoalan utama penelitian, tetapi sebagai bagian dari analisis yang lebih luas mengenai bagaimana Amerika Serikat memilih mitra dalam pembentukan koalisi keamanan regional.

Batas keterlibatan Meksiko juga berkaitan dengan perbedaan pendekatan keamanan antara Amerika Serikat dan Meksiko. Pemerintah Meksiko di bawah Presiden Claudia Sheinbaum menekankan pentingnya kedaulatan negara dan

menolak kemungkinan intervensi militer Amerika Serikat di wilayah Meksiko. Reuters melaporkan bahwa Sheinbaum menolak intervensi militer Amerika Serikat dalam upaya menghadapi kartel dan menegaskan bahwa kerja sama keamanan harus dilakukan melalui koordinasi tanpa subordinasi (Siniawski & Cortes, 2026). Sikap ini menunjukkan bahwa Meksiko tidak menolak kerja sama keamanan, tetapi memiliki batas politik terhadap bentuk kerja sama yang dianggap dapat mengganggu kedaulatan nasional.

Dinamika tersebut memperlihatkan bahwa pembentukan koalisi keamanan regional tidak hanya berkaitan dengan keberadaan ancaman bersama, tetapi juga dengan bagaimana negara-negara kawasan merespons desain keamanan yang ditawarkan oleh Amerika Serikat. Negara yang memiliki keterkaitan langsung dengan sumber ancaman tidak otomatis menjadi mitra yang sesuai apabila terdapat perbedaan preferensi keamanan, sensitivitas kedaulatan, atau jarak politik dengan negara pemimpin koalisi. Oleh karena itu, komposisi *Americas Counter Cartel Coalition* perlu dianalisis melalui kerangka *coalition-building*, khususnya melalui konsep *coalition formation*, *partner selection*, dan *selective cooperation*.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting karena berupaya menjelaskan strategi Amerika Serikat dalam membentuk koalisi keamanan regional melalui *Americas Counter Cartel Coalition*. Penelitian ini tidak menjadikan penyelundupan opioid sebagai fokus utama, melainkan menempatkannya sebagai konteks yang menjelaskan mengapa isu kartel narkoba menjadi bagian dari agenda keamanan regional Amerika Serikat. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana Amerika Serikat membangun dukungan kawasan,

memilih mitra, dan membentuk pola kerja sama selektif dalam menghadapi ancaman kartel narkoba dan kejahatan terorganisir transnasional. Dengan demikian, penelitian ini menganalisis strategi *coalition-building* Amerika Serikat dalam pembentukan *Americas Counter Cartel Coalition* sebagai bagian dari strategi keamanan regional di kawasan Amerika.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah dalam latar belakang, maka peneliti menjabarkan dalam pertanyaan sebagai berikut:

Bagaimana strategi *coalition-building* Amerika Serikat dalam pembentukan *Americas Counter Cartel Coalition* sebagai bagian dari strategi keamanan regional di kawasan Amerika?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki dua tujuan yang ingin dicapai, yakni sebagai berikut:

#### **1.3.1. Tujuan Umum**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi *coalition-building* Amerika Serikat dalam pembentukan kerja sama keamanan regional melalui *Americas Counter Cartel Coalition*. Melalui tujuan ini, penelitian berupaya melihat bagaimana Amerika Serikat membangun dukungan regional, menentukan mitra kerja sama, serta membentuk pola koordinasi keamanan dalam merespons ancaman kartel narkoba dan penyelundupan opioid di kawasan Amerika.

### **1.3.2. Tujuan Khusus**

- a. Menjelaskan ancaman kartel narkoba dan kejahatan terorganisir transnasional sebagai latar belakang pembentukan *Americas Counter Cartel Coalition*.
- b. Menjelaskan penyelenggaraan *Americas Counter Cartel Coalition* sebagai forum kerja sama keamanan regional yang dipimpin oleh Amerika Serikat.
- c. Mengkaji bagaimana Amerika Serikat membangun dukungan regional dalam pembentukan kerja sama keamanan melalui *Americas Counter Cartel Coalition*.
- d. Menganalisis strategi *coalition-building* Amerika Serikat dalam pembentukan kerja sama keamanan regional, khususnya melalui proses pembentukan koalisi, pemilihan mitra, dan pola kerja sama selektif.

## **1.4. Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1. Kegunaan Teoritis**

Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hubungan internasional, khususnya dalam studi kerja sama keamanan regional dan teori *coalition-building*. Dengan menyoroti ketidakterlibatan Meksiko dalam inisiatif *Americas Counter Cartel Coalition*, penelitian ini dapat memperluas pemahaman mengenai bagaimana negara

pemimpin membentuk kerja sama keamanan dan menentukan aktor yang dilibatkan maupun tidak dilibatkan dalam suatu koalisi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kerja sama keamanan regional tidak selalu dibentuk secara inklusif, melainkan dapat dipengaruhi oleh kepentingan, preferensi, dan strategi negara pemimpin.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai hubungan antara krisis opioid, kejahatan transnasional, dan pembentukan strategi keamanan regional. Penelitian ini menempatkan krisis opioid tidak hanya sebagai persoalan kesehatan publik atau kejahatan lintas batas, tetapi juga sebagai isu yang mendorong terbentuknya kerja sama keamanan antarnegara. Oleh karena itu, penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dalam memahami bagaimana proses *partner selection*, perbedaan preferensi keamanan, serta pertimbangan politik dan strategis memengaruhi komposisi suatu kerja sama keamanan regional.

#### **1.4.2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi keamanan dalam memahami dinamika penyusunan strategi keamanan regional terhadap ancaman narkoba lintas batas. Dengan menganalisis ketidakterlibatan Meksiko dalam inisiatif *Americas Counter Cartel Coalition*, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya mempertimbangkan faktor politik, kedaulatan, dan perbedaan pendekatan keamanan dalam membentuk kerja sama regional. Selain itu, temuan penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan

pengendalian narkoba yang lebih inklusif, efektif, dan responsif terhadap peran aktor-aktor kunci dalam rantai penyelundupan opioid.

## **1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis**

### **1.5.1. Tinjauan Pustaka**

Analisis mengenai strategi *coalition-building* Amerika Serikat dalam pembentukan *Americas Counter Cartel Coalition* memerlukan pemahaman dari beberapa aspek, yaitu pembentukan koalisi yang dipimpin oleh Amerika Serikat, kartel narkoba dan kejahatan terorganisir transnasional sebagai ancaman keamanan regional, serta kerja sama keamanan regional di kawasan Amerika. Tinjauan pustaka berikut memberikan landasan untuk memahami bagaimana ancaman kartel narkoba tidak hanya dipahami sebagai persoalan kriminal atau penyelundupan lintas batas, tetapi juga sebagai isu keamanan yang mendorong Amerika Serikat untuk membangun dukungan dan kerja sama dengan negara-negara kawasan. Selain itu, bagian ini juga meninjau literatur mengenai *coalition-building* untuk menjelaskan bagaimana Amerika Serikat membentuk agenda kerja sama, memilih mitra, serta membangun pola kerja sama selektif dalam pembentukan ACCC.

Dalam memahami krisis opioid dan dinamika kebijakan pengendaliannya di Amerika Serikat, laporan berjudul "*Pain Management and the Opioid Epidemic: Balancing Societal and Individual Benefits and Risks of Prescription Opioid Use,*" oleh National Academics of Sciences, Engineering, and Medicine (2017) menjadi acuan penting. Laporan ini mengkaji pengendalian opioid legal melalui kerangka

regulatif dan pengawasan distribusi yang ketat, termasuk klasifikasi zat di bawah *Controlled Substances Act* (CSA), pembatasan pemberian resep, hingga sanksi terhadap penyimpangan praktik medis. Selain pendekatan hukum, laporan ini juga menyoroti strategi komunitas seperti *take-back programs*, yang mencerminkan pendekatan multidimensi pemerintah dalam menyeimbangkan manfaat medis opioid dengan risiko penyalahgunaannya. Studi ini menjadi dasar penting untuk memahami bagaimana aspek legal dan kesehatan masyarakat terlibat dalam membentuk kebijakan domestik Amerika Serikat terkait opioid. Namun, laporan ini masih berfokus pada pendekatan akademis-formal dan belum secara mendalam membahas dimensi sosial dari krisis opioid, seperti dampaknya terhadap komunitas rentan, ketimpangan dalam akses layanan kesehatan, atau dinamika sosial-budaya yang memperkuat pola penyalahgunaan.

Melengkapi pemahaman tersebut, artikel "*What is The Opioid Epidemic? A Public Health Explainer*" yang ditulis oleh Cassie Sun dan dipublikasikan oleh Feinberg School of Medicine, Northwestern University (2024) mengkaji dimensi krisis opioid sebagai isu kesehatan publik dan transnasional. Artikel ini menyoroti transisi dari penyalahgunaan opioid resep ke fentanil ilegal yang sebagian besar diselundupkan melalui perbatasan selatan Amerika Serikat, khususnya Meksiko. Penekanan diberikan pada bagaimana lonjakan penyelundupan fentanil berdampak terhadap kebijakan keamanan perbatasan serta mendorong peningkatan kerja sama lintas negara. Artikel ini memperluas kerangka pemahaman dengan menghubungkan antara krisis domestik Amerika Serikat dan dinamika kriminal

lintas batas, namun belum secara rinci menelaah implikasi terhadap hubungan dagang dan kebijakan tarif antara Amerika Serikat dan Meksiko.

Pemahaman mengenai dinamika perdagangan narkoba di Meksiko tidak dapat dilepaskan dari evolusi hubungan antara organisasi penyelundupan narkoba (DTOs) dan pemerintah Meksiko. Dalam penelitian yang disusun oleh Beittel (2022) berjudul *Mexico: Organized Crime and Drug Trafficking Organizations*, dijelaskan bahwa selama dekade-dekade awal abad ke-20an, pemerintah Meksiko menunjukkan toleransi terhadap aktivitas penyelundupan narkoba, khususnya pada masa kekuasaan *Institutional Revolutionary Party* (PRI). Hubungan simbiotik ini memungkinkan kartel-kartel untuk berkembang di wilayah tertentu, dengan tingkat perlindungan politik yang tinggi meskipun tetap dilakukan tindakan simbolik seperti penangkapan dan pemusnahan tanaman narkotika.

Transformasi besar terjadi pada 1980-an dan 1990-an ketika kartel Meksiko mengambil alih peran utama dalam perdagangan Kokain dari Kolombia ke Amerika Serikat, menjadikan mereka pelaku utama dalam rantai distribusi narkoba lintas negara. Strategi militerisasi yang dimulai sejak pemerintahan Presiden Felipe Calderón (2006-2012) dan dilanjutkan oleh penerusnya seperti Enrique Peña Nieto, berupaya memberantas kartel dengan pendekatan agresif. Namun, pendekatan ini seringkali memicu kekerasan antar kartel maupun terhadap pemerintah, serta meningkatkan pelanggaran HAM. Meskipun kerja sama bilateral melalui inisiatif seperti *Mérida Initiative* dan *Bicentennial Framework* terus berlangsung, upaya ini masih menghadapi tantangan besar dalam meredam fragmentasi kartel dan menjamin stabilitas jangka panjang.

Laporan ini menjadi pondasi penting dalam memahami konteks historis, politik, dan struktural dari maraknya penyelundupan narkoba lintas perbatasan antara Meksiko dengan Amerika Serikat yang turut mempengaruhi kebijakan keamanan dan perdagangan kedua negara. Namun, laporan ini masih terbatas dalam menjelaskan secara rinci mekanisme penyelundupan narkoba ke Amerika Serikat setelah tahun 1990-an, khususnya dalam konteks pergeseran ke opioid sintesis seperti fentanil.

Penelitian oleh Hartanto, Yusran, dan Awal (2022) yang berjudul “Kebijakan Presiden Donald Trump dalam Program Pembangunan Tembok Pembatas Sebagai Upaya Mencegah *Illegal Immigrant & Narcotics Smuggling* Asal Meksiko (2017-2020)” menyoroti bagaimana isu imigrasi ilegal dan penyelundupan narkoba menjadi pilar utama dalam kebijakan luar negeri Presiden Donald Trump. Salah satu kebijakan konkret yang dikaji adalah pembangunan tembok perbatasan antara Amerika Serikat dan Meksiko melalui *Executive Order 13767*, termasuk penggunaan pengawasan teknologi dan pengerahan *National Guard*. Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi keamanan perbatasan Trump tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga berdampak konkret terhadap hubungan bilateral dengan Meksiko dan kebijakan perdagangan seperti NAFTA. Penurunan penyeberangan ilegal sebesar 84% serta ditemukannya infrastruktur penyelundupan seperti terowongan menjadi indikator keberhasilan pendekatan militeristik Trump, meskipun menimbulkan kontroversi baik secara domestik maupun internasional. Kelemahan dari penelitian ini adalah fokus yang masih bersifat umum terhadap isu penyelundupan narkoba, tanpa mengkaji secara

spesifik dinamika dan tren penyelundupan opioid sintetis seperti fentanil dari Meksiko ke Amerika Serikat. Padahal, jenis narkotika inilah yang menjadi pusat dari krisis kesehatan publik di Amerika Serikat dalam dekade terakhir.

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, terdapat kesenjangan dalam kajian mengenai hubungan antara ancaman kartel narkotika, kejahatan terorganisir transnasional, dan pembentukan kerja sama keamanan regional yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Sebagian besar studi sebelumnya cenderung membahas isu kartel narkotika, krisis opioid, penyelundupan fentanil, atau kebijakan keamanan perbatasan secara terpisah. Namun, kajian yang secara khusus menganalisis bagaimana Amerika Serikat membangun koalisi keamanan regional dalam menghadapi ancaman kartel narkotika melalui *Americas Counter Cartel Coalition* masih terbatas. Padahal, pembentukan koalisi tersebut penting untuk dikaji karena menunjukkan bagaimana Amerika Serikat tidak hanya merespons ancaman melalui kebijakan domestik, tetapi juga melalui upaya membangun dukungan dan kerja sama dengan negara-negara di kawasan Amerika.

Oleh karena itu, *state of the art* penelitian ini terletak pada upaya untuk menganalisis strategi *coalition-building* Amerika Serikat dalam pembentukan *Americas Counter Cartel Coalition* sebagai bagian dari strategi keamanan regional. Penelitian ini tidak hanya melihat ancaman kartel narkotika sebagai persoalan kejahatan lintas batas, tetapi juga sebagai isu yang mendorong Amerika Serikat untuk membentuk kerja sama keamanan regional dengan negara-negara kawasan. Perspektif ini menjadi penting karena pembentukan koalisi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan ancaman bersama, tetapi juga oleh strategi negara

pemimpin dalam membangun dukungan, memilih mitra, dan menentukan pola kerja sama yang sesuai dengan kepentingan strategisnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai bagaimana Amerika Serikat membentuk koalisi keamanan regional, bagaimana mitra kerja sama dipilih, serta bagaimana kepentingan politik dan preferensi keamanan memengaruhi arah kerja sama dalam menghadapi ancaman kartel narkoba di kawasan Amerika.

## **1.5.2. Kerangka Teoritis**

### **1.5.2.1. Teori *Coalition-Building***

Penelitian ini menggunakan teori *coalition-building*, khususnya pemikiran Marina E. Henke mengenai pembentukan koalisi yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Teori ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana Amerika Serikat membentuk *Americas Counter Cartel Coalition* sebagai kerja sama keamanan regional dan menentukan negara-negara yang dilibatkan di dalamnya. Henke menjelaskan bahwa pembentukan koalisi multilateral yang dipimpin oleh Amerika Serikat merupakan proses politik dan diplomatik yang tidak terjadi secara otomatis hanya karena adanya ancaman bersama. Dalam proses tersebut, negara pemimpin koalisi perlu membangun dukungan melalui negosiasi, pendekatan diplomatik, serta penyesuaian terhadap kepentingan dan preferensi negara calon mitra. Oleh karena itu, *coalition-building* dapat dipahami sebagai proses strategis yang melibatkan upaya negara pemimpin dalam menentukan tujuan koalisi, membangun kesediaan negara lain untuk berpartisipasi, serta

memilih bentuk kerja sama yang sesuai dengan kepentingan koalisi (Henke, 2017; Henke, 2019).

Henke (2017) menjelaskan bahwa Amerika Serikat sebagai negara pemimpin memiliki peran sentral dalam membangun dukungan koalisi. Dalam proses tersebut, Amerika Serikat tidak hanya menawarkan kerja sama, tetapi juga secara aktif mengidentifikasi negara mana yang dianggap dapat mendukung misi koalisi. Proses ini dilakukan melalui jaringan diplomatik, hubungan bilateral dan multilateral, serta komunikasi politik yang memungkinkan Amerika Serikat memahami preferensi dan batas-batas kepentingan negara calon mitra. Oleh karena itu, keberhasilan pembentukan koalisi sangat bergantung pada kemampuan negara pemimpin untuk membaca kepentingan calon mitra dan menyesuaikan strategi diplomatiknya. Dalam konteks ini, koalisi tidak dapat dipahami sebagai bentuk kerja sama yang netral atau otomatis, melainkan sebagai hasil dari proses seleksi dan konstruksi dukungan politik yang dilakukan oleh negara pemimpin (Henke, 2017).

Pandangan Henke (2017) tersebut dapat diperkuat melalui pemikiran Sarah E. Kreps (2011) mengenai pembentukan koalisi dalam kebijakan keamanan Amerika Serikat. Kreps menjelaskan bahwa Amerika Serikat, meskipun sering memiliki kapasitas untuk bertindak secara unilateral, tetap memiliki insentif untuk membentuk koalisi karena koalisi dapat memberikan legitimasi politik, memperluas dukungan internasional, serta membantu pembagian beban dalam pelaksanaan agenda keamanan. Dengan demikian, koalisi tidak hanya berfungsi sebagai kerja sama teknis antarnegara, tetapi juga sebagai instrumen politik dan

strategis bagi negara pemimpin. Pandangan ini mendukung argumen Henke bahwa pembentukan koalisi yang dipimpin Amerika Serikat melibatkan proses politik dalam menentukan negara mana yang dianggap sesuai untuk mendukung tujuan koalisi (Kreps, 2011).

Dalam teori *coalition-building*, terdapat beberapa elemen penting yang relevan dengan penelitian ini, yaitu *coalition formation*, *partner selection*, dan *selective cooperation*. *Coalition formation* merujuk pada proses pembentukan kerja sama atau koalisi untuk merespons suatu isu tertentu. Proses ini mencakup penentuan tujuan kerja sama, pembentukan agenda, serta penyusunan desain koalisi oleh negara pemimpin. *Partner selection* merujuk pada proses pemilihan negara-negara yang dianggap sesuai untuk dilibatkan dalam koalisi. Dalam proses ini, negara pemimpin tidak hanya mempertimbangkan kedekatan geografis atau relevansi teknis suatu negara terhadap isu yang dihadapi, tetapi juga mempertimbangkan kesediaan, kapasitas, hubungan diplomatik, kesamaan kepentingan, serta kesesuaian preferensi kebijakan negara calon mitra. Sementara itu, *selective cooperation* merujuk pada pola kerja sama yang terbentuk ketika negara pemimpin hanya melibatkan aktor-aktor tertentu dan tidak melibatkan seluruh negara yang sebenarnya relevan dengan isu tersebut.

Dalam konteks penelitian ini, teori *coalition-building* digunakan untuk menjelaskan ketidakterlibatan Meksiko dalam inisiatif *Americas Counter Cartel Coalition*. Meksiko memiliki posisi penting dalam rantai penyelundupan opioid ke Amerika Serikat karena wilayahnya berkaitan dengan operasi kartel narkoba, jalur produksi dan transit fentanil ilegal, serta perbatasan langsung dengan

Amerika Serikat. Namun, posisi strategis tersebut tidak secara otomatis membuat Meksiko diintegrasikan dalam kerja sama keamanan regional yang dibentuk oleh Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan mitra dalam kerja sama keamanan tidak hanya didasarkan pada relevansi suatu negara terhadap ancaman, tetapi juga pada pertimbangan politik dan strategis yang melekat dalam proses pembentukan koalisi.

Melalui teori ini, *Americas Counter Cartel Coalition* dapat dipahami sebagai kerja sama keamanan regional yang dibentuk secara selektif oleh Amerika Serikat untuk menghadapi kartel narkoba, *narco-terrorism*, dan kejahatan terorganisir transnasional. Ketidakterlibatan Meksiko tidak dapat dijelaskan hanya dengan melihat posisi Meksiko dalam rantai penyelundupan opioid, tetapi juga perlu dilihat dari proses pemilihan mitra oleh Amerika Serikat sebagai negara pemimpin koalisi. Dalam kerangka Henke, Amerika Serikat tetap perlu membangun dukungan melalui proses diplomatik dengan mempertimbangkan kepentingan, sikap politik, dan kesediaan negara calon mitra untuk bergabung dalam koalisi. Oleh karena itu, negara yang relevan terhadap suatu isu belum tentu otomatis dilibatkan apabila tidak sesuai dengan tujuan dan desain kerja sama yang dibangun oleh Amerika Serikat.

Dalam kasus Meksiko, posisi strategisnya sebagai negara yang berkaitan dengan operasi kartel narkoba, jalur penyelundupan fentanil, dan perbatasan langsung dengan Amerika Serikat tidak secara otomatis menjadikannya mitra yang sesuai dalam desain ACCC. Hal ini terutama dapat dilihat apabila terdapat perbedaan preferensi kebijakan, sensitivitas kedaulatan, serta penolakan terhadap

kemungkinan intervensi militer asing dalam operasi anti-kartel. Dengan demikian, teori *coalition-building* menjadi kerangka yang relevan untuk menjelaskan mengapa Amerika Serikat membentuk kerja sama keamanan regional untuk menghadapi ancaman kartel dan penyelundupan opioid, tetapi tidak mengintegrasikan Meksiko secara penuh dalam inisiatif tersebut.

## **1.6. Operasionalisasi Konsep**

### **1.6.1. Definisi Konseptual**

#### **1.6.1.1. *Coalition Formation***

*Coalition formation* merupakan proses pembentukan koalisi atau kerja sama antara sejumlah aktor negara untuk mencapai tujuan tertentu dalam isu politik atau keamanan. Dalam kajian hubungan internasional, koalisi tidak selalu terbentuk secara otomatis hanya karena adanya ancaman bersama, melainkan melalui proses politik, diplomatik, dan strategis yang melibatkan negara pemimpin dan negara calon mitra. Henke menjelaskan bahwa pembentukan koalisi yang dipimpin Amerika Serikat merupakan proses diplomatik yang dipengaruhi oleh jaringan bilateral dan multilateral. Jaringan tersebut memungkinkan negara pemimpin memperoleh informasi mengenai preferensi negara calon mitra, membangun dukungan, serta menyesuaikan strategi diplomatik dalam proses pembentukan koalisi (Henke, 2017).

Dalam pemikiran Henke (2017), negara pemimpin koalisi memiliki peran penting dalam menentukan arah, tujuan, dan desain kerja sama yang akan dibangun. Negara pemimpin tidak hanya merespons ancaman, tetapi juga

membentuk agenda koalisi, mengidentifikasi kebutuhan kerja sama, serta membangun dukungan politik dari negara-negara yang dianggap potensial. Oleh karena itu, *coalition formation* dapat dipahami sebagai proses pembentukan kerja sama yang dipengaruhi oleh kepentingan, preferensi, kapasitas, serta hubungan diplomatik antarnegara. Dalam penelitian ini, konsep *coalition formation* digunakan untuk memahami bagaimana Amerika Serikat membentuk *Americas Counter Cartel Coalition* sebagai kerja sama keamanan regional untuk menghadapi kartel narkoba, penyelundupan fentanil, dan kejahatan terorganisir transnasional.

Proses pembentukan koalisi tersebut kemudian berkaitan langsung dengan pertanyaan mengenai siapa saja aktor yang akan dilibatkan dalam kerja sama. Setelah negara pemimpin menentukan tujuan dan desain koalisi, langkah berikutnya adalah memilih negara calon mitra yang dianggap mampu dan bersedia mendukung agenda tersebut. Dengan demikian, pembentukan koalisi tidak dapat dipisahkan dari proses pemilihan mitra, karena keberhasilan suatu koalisi sangat bergantung pada kesesuaian antara tujuan kerja sama dan negara-negara yang dilibatkan di dalamnya.

#### **1.6.1.2. *Partner Selection***

*Partner selection* merujuk pada proses pemilihan negara atau aktor yang akan dilibatkan dalam suatu koalisi atau kerja sama. Dalam kerangka *coalition-building* Henke, pemilihan mitra tidak hanya ditentukan oleh keberadaan ancaman bersama, tetapi juga oleh proses diplomatik yang

memungkinkan negara pemimpin memahami kepentingan dan preferensi negara calon mitra. Henke menjelaskan bahwa jaringan diplomatik, baik bilateral maupun multilateral, berperan penting karena dapat memberikan informasi mengenai posisi, kepentingan, dan kemungkinan dukungan negara lain terhadap suatu koalisi (Henke, 2017).

Dalam proses tersebut, negara pemimpin koalisi berupaya mengidentifikasi aktor mana yang dianggap sesuai dengan tujuan kerja sama yang ingin dibangun. Kesesuaian tersebut dapat dilihat dari preferensi politik, hubungan diplomatik, penerimaan terhadap misi koalisi, serta sejauh mana negara calon mitra dapat mendukung desain kerja sama yang ditawarkan. Dengan demikian, negara yang memiliki keterkaitan langsung dengan suatu isu tidak selalu otomatis dilibatkan dalam koalisi, karena pemilihan mitra juga dipengaruhi oleh kecocokan preferensi dan proses diplomatik yang dibangun oleh negara pemimpin (Henke, 2019).

#### **1.6.1.3. *Selective Cooperation***

Selective cooperation merujuk pada pola kerja sama yang terbentuk ketika koalisi tidak melibatkan seluruh aktor yang relevan terhadap suatu isu, tetapi hanya melibatkan aktor-aktor tertentu yang dianggap sesuai dengan tujuan kerja sama. Dalam konteks *teori coalition-building*, selektivitas ini dapat muncul karena negara pemimpin koalisi memiliki keterbatasan dalam membangun kerja sama dengan semua aktor, sehingga perlu memilih mitra berdasarkan kesediaan, kapasitas, preferensi, dan kesesuaian politik. Oleh karena itu, *selective*

*cooperation* tidak dipahami sebagai teori utama yang berdiri sendiri, melainkan sebagai pola yang dapat muncul dari proses *coalition formation* dan *partner selection*.

Pola kerja sama selektif menunjukkan bahwa relevansi suatu negara terhadap isu tertentu tidak selalu menjamin negara tersebut akan dilibatkan dalam koalisi. Negara pemimpin dapat memilih aktor yang dianggap lebih sesuai dengan misi, lebih mudah diajak bekerja sama, atau lebih sejalan dengan desain kerja sama yang ingin dibangun. Dalam kerangka ini, kerja sama internasional tidak selalu bersifat inklusif, tetapi dapat bersifat terbatas karena dipengaruhi oleh proses pemilihan mitra dan pertimbangan strategis negara pemimpin koalisi.

## **1.6.2. Definisi Operasional**

### **1.6.2.1. *Coalition Formation***

Dalam penelitian ini, *coalition formation* dioperasionalkan untuk melihat proses pembentukan *Americas Counter Cartel Coalition* sebagai kerja sama keamanan regional yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Konsep ini digunakan untuk menganalisis latar belakang pembentukan inisiatif tersebut, isu keamanan yang menjadi dasar pembentukannya, tujuan kerja sama, serta peran Amerika Serikat sebagai negara pemimpin. Melalui konsep ini, penelitian akan melihat bagaimana *Americas Counter Cartel Coalition* dibangun sebagai respons terhadap kartel narkoba, *narco-terrorism*, penyelundupan opioid, dan kejahatan terorganisir transnasional di kawasan Amerika.

Indikator yang digunakan dalam konsep ini meliputi latar belakang pembentukan ACCC, tujuan inisiatif, bentuk kerja sama yang ditawarkan, peran Amerika Serikat sebagai penggagas, serta narasi keamanan yang digunakan dalam ACCC dan dokumen terkait. Dengan indikator tersebut, penelitian dapat menjelaskan bagaimana Amerika Serikat menyusun desain kerja sama keamanan regional sebelum menganalisis mengapa negara tertentu dilibatkan atau tidak dilibatkan dalam inisiatif tersebut.

#### **1.6.2.2. *Partner Selection***

Dalam penelitian ini, *partner selection* dioperasionalkan untuk menganalisis proses pemilihan negara peserta dalam *Americas Counter Cartel Coalition*. Konsep ini digunakan untuk melihat faktor-faktor yang membuat suatu negara dianggap sesuai atau tidak sesuai untuk dilibatkan dalam kerja sama keamanan regional yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Fokus utama dari konsep ini adalah ketidakterlibatan Meksiko, meskipun negara tersebut memiliki posisi penting dalam rantai penyelundupan opioid ke Amerika Serikat.

Indikator yang digunakan dalam konsep ini meliputi komposisi negara peserta *Americas Counter Cartel Coalition*, negara-negara yang tidak dilibatkan, posisi Meksiko dalam rantai penyelundupan opioid, hubungan bilateral Amerika Serikat-Meksiko, perbedaan pendekatan kedua negara dalam menghadapi kartel, sensitivitas Meksiko terhadap isu kedaulatan, serta sikap Meksiko terhadap kemungkinan intervensi militer asing. Melalui indikator tersebut, penelitian dapat menjelaskan bahwa ketidakterlibatan Meksiko tidak hanya berkaitan dengan

relevansi isu, tetapi juga dengan kesesuaian preferensi dan penerimaan Meksiko terhadap desain kerja sama yang dibangun oleh Amerika Serikat.

### **1.6.2.3. *Selective Cooperation***

Dalam penelitian ini, *selective cooperation* dioperasionalkan untuk melihat pola selektivitas dalam *Americas Counter Cartel Coalition*. Konsep ini digunakan untuk menganalisis bagaimana Amerika Serikat membentuk kerja sama keamanan regional yang tidak melibatkan seluruh aktor penting dalam isu kartel narkoba. Dengan kata lain, *selective cooperation* digunakan untuk menunjukkan bahwa *Americas Counter Cartel Coalition* merupakan kerja sama yang bersifat terbatas dan selektif, karena hanya melibatkan negara-negara tertentu yang dianggap sesuai dengan tujuan dan pendekatan Amerika Serikat.

Indikator yang digunakan dalam konsep ini meliputi perbandingan antara negara yang dilibatkan dan tidak dilibatkan, relevansi negara-negara tersebut terhadap isu narkoba dan kejahatan transnasional, serta alasan politik dan strategis yang memengaruhi komposisi kerja sama. Dalam konteks penelitian ini, absennya Meksiko menjadi indikator utama untuk melihat adanya pola *selective cooperation*. Meksiko memiliki posisi signifikan dalam isu opioid karena wilayahnya berkaitan dengan operasi kartel dan jalur penyelundupan fentanil, tetapi negara tersebut tidak diintegrasikan dalam ACCC. Oleh karena itu, konsep ini digunakan untuk menjelaskan bahwa kerja sama keamanan yang dipimpin Amerika Serikat tidak selalu melibatkan aktor yang paling relevan terhadap

sumber ancaman, melainkan aktor yang dianggap paling sesuai dengan desain dan kepentingan kerja sama.

### **1.7. Argumen Penelitian**

Penelitian ini berargumen bahwa pembentukan *Americas Counter Cartel Coalition* merupakan bagian dari strategi *coalition-building* Amerika Serikat dalam membangun kerja sama keamanan regional di kawasan Amerika. Amerika Serikat tidak hanya memandang kartel narkoba dan jaringan kriminal transnasional sebagai ancaman domestik atau perbatasan, tetapi juga sebagai ancaman regional yang membutuhkan dukungan dari negara-negara kawasan. Oleh karena itu, pembentukan koalisi ini dapat dipahami sebagai upaya Amerika Serikat untuk memperluas dukungan, membangun legitimasi, serta memperkuat koordinasi keamanan dalam menghadapi ancaman kartel narkoba.

Dengan menggunakan kerangka *US-led coalition-building* dari Marina E. Henke, penelitian ini melihat bahwa koalisi yang dipimpin Amerika Serikat tidak terbentuk secara otomatis hanya karena adanya ancaman bersama. Koalisi dibangun melalui proses diplomatik, pembacaan preferensi negara calon mitra, serta penilaian terhadap kesesuaian negara tersebut dengan tujuan dan desain kerja sama yang dibentuk oleh negara pemimpin. Pandangan ini diperkuat oleh Kreps yang menjelaskan bahwa Amerika Serikat, meskipun memiliki kapasitas untuk bertindak secara unilateral, tetap dapat memilih membentuk koalisi karena koalisi memberikan legitimasi, pembagian beban, serta fleksibilitas politik dalam menjalankan agenda keamanan. Dalam konteks ini, Amerika Serikat

menggunakan *Americas Counter Cartel Coalition* sebagai ruang diplomatik untuk membangun dukungan regional dan mengarahkan pembentukan kerja sama keamanan terhadap ancaman kartel narkoba (Henke, 2017; Henke, 2019; Kreps, 2011).

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini berargumen bahwa strategi *coalition-building* Amerika Serikat dalam pembentukan *Americas Counter Cartel Coalition* dilakukan melalui tiga pola utama. Pertama, Amerika Serikat membentuk isu kartel narkoba sebagai ancaman keamanan regional sehingga negara-negara kawasan dapat diposisikan sebagai bagian dari respons kolektif. Kedua, Amerika Serikat membangun dukungan melalui forum diplomatik dan kerja sama keamanan yang menekankan koordinasi, pertukaran informasi, pengawasan perbatasan, serta penanggulangan kejahatan transnasional. Ketiga, Amerika Serikat melakukan pemilihan mitra secara selektif dengan melibatkan negara-negara yang dianggap memiliki kesesuaian kepentingan, preferensi keamanan, dan kesediaan untuk mendukung agenda keamanan yang dipimpin oleh Amerika Serikat.

Dengan demikian, penelitian ini berargumen bahwa *Americas Counter Cartel Coalition* tidak dapat dipahami hanya sebagai respons teknis terhadap ancaman kartel narkoba, melainkan sebagai instrumen strategis Amerika Serikat dalam membentuk kerja sama keamanan regional. Pembentukan koalisi tersebut menunjukkan bahwa kerja sama keamanan regional dipengaruhi oleh strategi negara pemimpin dalam membangun dukungan, memilih mitra, dan menentukan pola kerja sama yang sesuai dengan kepentingan strategisnya. Oleh karena itu,

pembentukan *Americas Counter Cartel Coalition* memperlihatkan bagaimana Amerika Serikat menggunakan *coalition-building* sebagai bagian dari strategi keamanan regional untuk menghadapi ancaman kartel narkoba dan kejahatan terorganisir transnasional di kawasan Amerika.

### **1.8. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami dinamika sosial-politik dalam pembentukan kerja sama keamanan regional Amerika Serikat melalui *Americas Counter Cartel Coalition* (ACCC). Metode ini digunakan karena penelitian berfokus pada analisis mendalam mengenai bagaimana Amerika Serikat membentuk kerja sama keamanan regional, membangun dukungan, serta menentukan negara-negara yang dilibatkan dalam koalisi tersebut. Metode kualitatif relevan dalam penelitian ini karena fokus analisis tidak terletak pada pengukuran statistik, melainkan pada pemahaman mengenai konteks kebijakan, hubungan antarnegara, dan proses *coalition-building* dalam kerja sama keamanan regional (Creswell, 2014).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis konten dan studi kasus. Analisis konten digunakan untuk mengkaji dokumen resmi, laporan lembaga, deklarasi keamanan bersama, pernyataan pemerintah, berita, dan artikel analisis kebijakan yang relevan dengan pembentukan ACCC. Dokumen yang dianalisis meliputi laporan dari *Drug Enforcement Administration* (DEA), *U.S. Customs and Border Protection* (CBP), dokumen *Americas Counter Cartel Conference Joint Security Declaration*, serta sumber-sumber terkait *Shield of the*

*Americas* dan kerja sama keamanan regional Amerika Serikat. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menginterpretasikan makna teks, narasi kebijakan, dan arah strategi keamanan Amerika Serikat dalam konteks sosial-politik tertentu (Bryman & Burgess, 2009).

Studi kasus digunakan untuk mengkaji pembentukan ACCC sebagai bentuk kerja sama keamanan regional yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Melalui studi kasus ini, penelitian menganalisis bagaimana Amerika Serikat membangun koalisi, memilih mitra, dan membentuk pola kerja sama selektif dalam menghadapi ancaman kartel narkoba dan kejahatan terorganisir transnasional. Meksiko, Brasil, dan Kolombia dibahas sebagai bagian dari analisis mengenai batas keterlibatan aktor relevan dalam koalisi, bukan sebagai fokus utama penelitian. Dengan demikian, studi kasus dalam penelitian ini diarahkan untuk memahami strategi *coalition-building* Amerika Serikat dalam pembentukan ACCC sebagai bagian dari strategi keamanan regional di kawasan Amerika.

### **1.8.1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif-analitis. Tipe deskriptif digunakan untuk menggambarkan konteks empiris mengenai pembentukan *Americas Counter Cartel Coalition* sebagai kerja sama keamanan regional yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Melalui tipe ini, penelitian menjelaskan latar belakang ancaman kartel narkoba dan kejahatan terorganisir transnasional, penyelenggaraan *Americas Counter Cartel Conference*, serta komposisi awal negara-negara yang dilibatkan dalam kerja sama tersebut.

Sementara itu, tipe analitis digunakan untuk menganalisis strategi *coalition-building* Amerika Serikat dalam pembentukan *Americas Counter Cartel Coalition*. Analisis diarahkan pada bagaimana Amerika Serikat membangun dukungan regional, memilih mitra, serta membentuk pola kerja sama selektif dalam menghadapi ancaman kartel narkoba dan kejahatan transnasional. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan keberadaan ACCC sebagai kerja sama keamanan regional, tetapi juga menganalisis proses politik dan strategis yang melatarbelakangi pembentukan koalisi tersebut.

Tipe penelitian deskriptif-analitis dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang berupaya memahami suatu fenomena hubungan internasional secara mendalam melalui pemaparan data dan analisis terhadap konteks kebijakan. Dalam penelitian ini, fenomena yang dikaji adalah strategi *coalition-building* Amerika Serikat dalam membentuk kerja sama keamanan regional di kawasan Amerika. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada penjelasan dan analisis terhadap dokumen resmi, laporan lembaga, pernyataan pemerintah, serta artikel analisis yang berkaitan dengan pembentukan *Americas Counter Cartel Coalition*.

### **1.8.2. Situs Penelitian**

Situs penelitian ini merujuk pada ruang kebijakan dan institusi pemerintahan Amerika Serikat yang berkaitan dengan krisis opioid, pengendalian narkoba lintas negara, hubungan bilateral Amerika Serikat-Meksiko, serta pembentukan inisiatif *Americas Counter Cartel Coalition*. Fokus utama penelitian

diarahkan pada dinamika kebijakan Amerika Serikat terhadap penyelundupan opioid dari Meksiko, terutama dalam konteks perbatasan selatan Amerika Serikat yang menjadi jalur penting peredaran fentanil dan opioid sintetis. Selain itu, penelitian ini juga menempatkan Meksiko sebagai bagian penting dari situs kajian karena wilayahnya berkaitan dengan operasi kartel narkotika, jalur produksi dan transit fentanil, serta dinamika kerja sama keamanan dengan Amerika Serikat.

Situs penelitian ini juga mencakup institusi-institusi kunci yang berperan dalam isu narkotika, keamanan perbatasan, dan kerja sama keamanan regional. Beberapa institusi tersebut meliputi Drug Enforcement Administration (DEA), U.S. Customs and Border Protection (CBP), Department of Homeland Security (DHS), Department of State, serta Kantor Kepresidenan Amerika Serikat. Institusi-institusi tersebut dipilih karena memiliki keterkaitan langsung dengan pengumpulan data, penyusunan kebijakan, pengamanan perbatasan, diplomasi keamanan, serta pembentukan kerja sama regional yang berkaitan dengan kartel narkotika dan penyelundupan opioid.

Penelitian ini juga memanfaatkan ruang digital sebagai bagian dari situs penelitian, terutama karena data yang digunakan bersumber dari dokumen dan arsip kebijakan yang tersedia secara daring. Ruang digital tersebut mencakup situs web resmi pemerintah, dokumen *Americas Counter Cartel Conference Joint Security Declaration*, laporan lembaga, database kebijakan, serta media massa kredibel yang membahas krisis opioid, kartel narkotika Meksiko, hubungan bilateral Amerika Serikat-Meksiko, dan *Americas Counter Cartel Conference*. Melalui situs penelitian tersebut, peneliti dapat menganalisis pembentukan

*Americas Counter Cartel Conference*, posisi Meksiko dalam rantai penyelundupan opioid, serta dinamika pemilihan mitra dalam kerja sama keamanan regional Amerika Serikat.

### **1.8.3. Subjek Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian sering disebut sebagai informan (Sugiyono, 2015). Informan adalah pihak-pihak atau elemen yang memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti untuk memahami secara menyeluruh fenomena yang diteliti (Moleong, 2015). Subjek dalam penelitian ini mencakup lembaga-lembaga pemerintah Amerika Serikat yang berperan dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan keamanan perbatasan dan pengendalian narkotika, seperti U.S Customs and Border Protection (CBP), Drug Enforcement Administration (DEA), Department of Homeland Security (DHS), dan White House Office of National Drug Control Policy (ONDCP). Selain itu, dokumen kebijakan resmi, pidato presiden, laporan tahunan institusi keamanan, serta pernyataan dari aktor-aktor politik seperti Presiden Donald Trump dan pejabat tinggi lainnya dijadikan subjek kajian untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai arah dan perubahan kebijakan perbatasan dalam merespons krisis opioid.

### **1.8.4. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersifat naratif, tekstual, dan deskriptif. Data ini terdiri dari dokumen-dokumen kebijakan dan laporan resmi lembaga pemerintahan AS, pidato presiden dan

pejabat negara, artikel berita, dokumen pengawasan perbatasan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan krisis opioid dan kebijakan perbatasan. Data ini juga mencakup publikasi yang menjelaskan hubungan antara penyelundupan opioid dan dinamika kebijakan keamanan nasional.

#### **1.8.5. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi seperti kebijakan imigrasi dan keamanan perbatasan, pernyataan presiden, laporan dari institusi seperti DEA, CBP, dan DHS, serta rekaman rapat kongres atau pidato kenegaraan terkait krisis opioid. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari jurnal akademik, laporan penelitian terdahulu, artikel berita, publikasi think tank seperti Brookings Institution atau Council on Foreign Relations, serta data dari media daring yang memberikan gambaran tentang wacana publik dan respons sosial-politik terhadap penyelundupan opioid dan kebijakan keamanan perbatasan.

#### **1.8.6. Teknik Pengambilan Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan *Qualitative Content Analysis* untuk mengkaji dokumen, laporan, pernyataan resmi, dan sumber kebijakan yang relevan (Mayring, 2014). Tahap awal dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan topik utama, seperti krisis opioid, penyelundupan fentanil, kartel narkotika Meksiko, hubungan bilateral Amerika Serikat-Meksiko, dan *Americas Counter Cartel Conference*. Setelah itu, peneliti melakukan *coding* terhadap bagian-bagian data yang berkaitan dengan

pembentukan kerja sama keamanan regional, pemilihan mitra, serta ketidakterlibatan Meksiko dalam inisiatif tersebut.

Kode-kode tersebut kemudian disusun menjadi tema analitis, seperti *coalition formation*, *partner selection*, dan *selective cooperation* dalam pembentukan *Americas Counter Cartel Conference*. Hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi deskriptif-analitis yang dihubungkan dengan teori *coalition-building* dari Marina E. Henke. Interpretasi dilakukan dengan mempertimbangkan posisi Meksiko dalam rantai penyelundupan opioid, dinamika hubungan Amerika Serikat-Meksiko, isu kedaulatan, serta perbedaan pendekatan keamanan kedua negara.

#### **1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *qualitative content analysis*. Teknik ini digunakan untuk menganalisis isi dokumen, laporan resmi, pernyataan pemerintah, artikel analisis, dan berita yang berkaitan dengan pembentukan *Americas Counter Cartel Coalition*. Melalui teknik ini, peneliti tidak hanya membaca data sebagai informasi faktual, tetapi juga menafsirkan makna, narasi, dan arah kebijakan yang muncul dalam dokumen-dokumen tersebut. Analisis ini penting karena penelitian berfokus pada bagaimana Amerika Serikat membangun kerja sama keamanan regional melalui strategi *coalition-building*.

Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, peneliti mengumpulkan data yang relevan dengan isu kartel narkoba, kejahatan

terorganisir transnasional, *Americas Counter Cartel Conference*, *Americas Counter Cartel Coalition*, serta kerja sama keamanan regional Amerika Serikat. Kedua, data yang telah terkumpul diklasifikasikan berdasarkan tema utama penelitian, yaitu *coalition formation*, *partner selection*, dan *selective cooperation*. Ketiga, data dianalisis dengan menghubungkan temuan empiris dengan kerangka teori *coalition-building* untuk melihat bagaimana Amerika Serikat membentuk koalisi, membangun dukungan, memilih mitra, dan menentukan pola kerja sama dalam ACCC.

Interpretasi data dilakukan dengan membaca hubungan antara dokumen resmi, pernyataan aktor, komposisi negara peserta, serta analisis kebijakan yang berkaitan dengan ACCC. Dalam tahap ini, peneliti menafsirkan bagaimana Amerika Serikat memosisikan kartel narkoba dan kejahatan transnasional sebagai ancaman keamanan regional. Selain itu, peneliti juga menafsirkan bagaimana pemilihan negara peserta dan tidak terlibatnya beberapa aktor relevan, seperti Meksiko, Brasil, dan Kolombia, menunjukkan adanya proses *partner selection* dan *selective cooperation*. Dengan demikian, interpretasi data diarahkan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai strategi *coalition-building* Amerika Serikat dalam pembentukan *Americas Counter Cartel Coalition* sebagai bagian dari strategi keamanan regional di kawasan Amerika.

Hasil analisis kemudian disusun secara deskriptif-analitis. Secara deskriptif, penelitian ini memaparkan konteks empiris pembentukan ACCC, ancaman kartel narkoba, serta dinamika kerja sama keamanan regional Amerika

Serikat. Secara analitis, penelitian ini menjelaskan bagaimana data tersebut menunjukkan strategi Amerika Serikat dalam membangun koalisi, menentukan mitra, dan membentuk kerja sama yang bersifat selektif. Dengan demikian, analisis dan interpretasi data dalam penelitian ini digunakan untuk menghubungkan temuan empiris dengan kerangka teoritis, sehingga dapat memberikan penjelasan yang sistematis terhadap strategi *coalition-building* Amerika Serikat dalam pembentukan ACCC.

#### **1.8.8. Kualitas Data**

Memastikan kualitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan metode, yakni membandingkan data dari berbagai jenis dokumen dan institusi guna membangun validitas temuan. Validitas diperkuat melalui penggunaan dokumen resmi dari pemerintah AS, data empiris dari lembaga pemantau narkoba, serta sumber-sumber sekunder dari jurnal ilmiah dan publikasi akademik. Peneliti juga memperhatikan konfirmabilitas temuan, yaitu sejauh mana hasil penelitian dapat ditelusuri dan diuji ulang oleh peneliti lain (Lincoln & Guba, 1985 dalam Budiastuti & Bandur, 2018). Seluruh proses pengumpulan dan analisis data dilakukan secara terdokumentasi, sistematis, dan transparan. Peneliti juga melakukan refleksi kritis terhadap posisi dan potensi bias dalam memaknai narasi kebijakan, terutama karena topik ini bersinggungan erat dengan isu politik, keamanan, dan kesehatan publik. Reliabilitas dijaga melalui konsistensi penggunaan teknik analisis dan ketepatan dalam mengaitkan data dengan kerangka teoritis yang digunakan.